

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah langkah awal dalam penelitian yang dilakukan untuk memahami konsep dan teori yang relevan dengan topik penelitian.

Menurut (Semi, 2003), narasi merupakan bentuk percakapan atau tulisan yang berisi cerita yang disajikan secara kronologis dan berisi unsur-unsur seperti pertanyaan, jawaban, dan konflik. Narasi dapat berisi fakta atau fiksi. Narasi yang berisi fakta disebut narasi ekspositoris, sedangkan narasi yang berisi fiksi disebut narasi sugestif

##### **2.1.1 Hubungan internasional**

Hubungan internasional bermula dari interaksi antarnegara di segala aspek, terutama dalam ranah politik. Namun, seiring berjalannya waktu, isu-isu internasional telah meluas dari sekadar politik menjadi meliputi aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya. Istilah hubungan internasional mencakup segala bentuk interaksi antara masyarakat dari berbagai negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara. Studi dalam bidang hubungan internasional mencakup politik luar negeri, relasi antarnegara, lembaga perdagangan internasional, pariwisata, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan perkembangan nilai serta etika internasional. Peran negara dalam politik global semakin mengecil sementara aktor non-negara semakin meningkat. Batas antarnegara semakin samar dan tidak lagi relevan, bahkan bagi beberapa aktor

non-negara, batas wilayah geografis tidak lagi menjadi hal yang penting. (Perwita & Yani, 2005)

Hubungan internasional memunculkan kompleksitas karena melibatkan beragam bangsa yang memiliki kedaulatan sendiri-sendiri, sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit dibandingkan dengan hubungan antar kelompok di dalam suatu negara. Meskipun demikian, tujuan utama studi dalam bidang hubungan internasional adalah untuk memahami perilaku internasional, yang meliputi tindakan aktor negara dan non-negara. Perilaku ini dapat berupa perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi di dalam organisasi internasional, dan sebagainya.

Penelitian mengenai hubungan internasional sering diinterpretasikan sebagai kajian tentang interaksi antara berbagai pihak yang melampaui batas-batas negara. Adanya hubungan internasional menjadi suatu kebutuhan karena timbulnya saling ketergantungan dan semakin rumitnya kehidupan manusia dalam lingkup masyarakat internasional, sehingga interdependensi mencegah kemungkinan bagi suatu negara untuk mengisolasi diri dari dunia luar (Perwita & Yani, 2005)

Pada awalnya, studi hubungan internasional hanya berfokus pada interaksi antara negara-negara yang memiliki kedaulatan. Namun, seiring berjalannya waktu, ruang lingkup ilmu ini semakin meluas. Selama Perang Dunia II dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, studi hubungan internasional mengalami perkembangan signifikan. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, perkembangan studi ini semakin kompleks dengan munculnya organisasi

antarpemerintah dan organisasi non-pemerintah. Pada dekade 1980-an, studi hubungan internasional memperhatikan interaksi antara negara-negara yang memiliki kedaulatan, serta perilaku aktor non-negara yang memiliki dampak pada kehidupan negara-negara (Perwita & Yani, 2005) Berakhirnya Perang Dingin menandai akhir dari sistem bipolar dan memulai era multipolar, yang mengubah orientasi dari persaingan militer menjadi persaingan ekonomi di antara negara-negara di seluruh dunia. Setelah Perang Dingin, isu-isu dalam hubungan internasional yang sebelumnya didominasi oleh isu-isu politik dan keamanan menjadi lebih beragam, mencakup masalah seperti hak asasi manusia, ekonomi, lingkungan hidup, dan terorisme.

Dengan berakhirnya Perang Dingin, dunia mengalami periode transisi yang berdampak signifikan pada studi hubungan internasional. Perkembangan cepat terjadi dalam bidang ini, di mana hubungan internasional kontemporer tidak hanya memusatkan perhatian pada politik antar negara, tetapi juga memperluas cakupannya ke isu-isu seperti terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan sebagainya. Selain itu, hubungan internasional menjadi semakin kompleks, di mana interaksi tidak lagi terbatas pada negara saja, tetapi juga melibatkan aktor-aktor non-negara yang memiliki peran penting dalam dinamika hubungan internasional. (Perwita & Yani, 2005)

Istilah hubungan internasional memiliki beberapa makna. Pertama, itu merujuk pada bidang khusus yang mempelajari berbagai aspek internasional dari berbagai cabang ilmu pengetahuan. Kedua, itu mencakup sejarah baru dari politik internasional. Ketiga, mencakup semua aspek internasional dari kehidupan sosial

manusia, yang melibatkan perilaku manusia di suatu negara yang dapat mempengaruhi perilaku di negara lain. (Darmayadi, 2015)

Menurut Robert Jackson & George Sorenson dalam buku “Pengantar Studi Hubungan Internasional”, alasan pokok untuk mempelajari hubungan internasional adalah karena semua orang di dunia tinggal di dalam wilayah komunitas politik yang berbeda atau negara-negara yang merdeka, dan ini sangat memengaruhi cara hidup manusia. Bersama-sama, negara-negara ini membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global. (Sorensen, 1999)

Hubungan Internasional adalah segala bentuk interaksi antara masyarakat dan negara-negara, baik oleh negara maupun warga negara, yang melintasi batas-batas geografis negara. Terdapat lima unsur pokok dalam studi tentang hubungan internasional: Pertama, sifat dan implementasi sistem kenegaraan. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan kekuatan suatu negara. Ketiga, posisi dan kebijakan luar negeri dari negara-negara besar. Keempat, sejarah hubungan internasional masa lalu. Dan kelima, pembentukan tatanan dunia yang lebih stabil. (Darmayadi, 2015)

Hubungan internasional adalah serangkaian upaya yang harus dilakukan oleh semua negara di dunia, mengingat semakin meningkatnya persoalan antar negara yang dihadapi oleh masyarakat internasional, yang menciptakan ketergantungan antar negara. Pola interaksi dalam hubungan internasional tidak terlepas dari segala bentuk interaksi dan pelakunya dalam komunitas masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (state-actor) maupun pelaku non-negara

(non-state actor). Interaksi ini dapat berupa kerjasama, persaingan, maupun konflik. (May Rudy, 2005).

Konsep budaya dalam hubungan internasional mengacu pada cara budaya mempengaruhi interaksi antara negara dan bagaimana nilai-nilai, kepercayaan, adat istiadat, dan praktik budaya dapat membentuk kebijakan luar negeri dan diplomasi. Budaya memainkan peran penting dalam membangun pemahaman dan kerjasama internasional serta dalam mempromosikan perdamaian dan keamanan global.

#### Pengaruh Budaya dalam Hubungan Internasional

1. Soft Power: Budaya merupakan elemen kunci dari soft power, yang dicetuskan oleh Joseph Nye. Soft power adalah kemampuan untuk menarik dan mempengaruhi melalui daya tarik budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan yang menarik, bukan melalui paksaan atau pembayaran. Negara-negara menggunakan elemen budaya mereka, seperti seni, musik, film, dan pendidikan, untuk membangun citra positif di mata dunia dan mempengaruhi negara lain. (Nye, 2004)
2. Diplomasi Budaya: Ini melibatkan penggunaan budaya untuk mencapai tujuan diplomatik. Pemerintah sering mengirimkan seniman, musisi, dan akademisi ke luar negeri untuk mempromosikan budaya mereka dan memperkuat hubungan bilateral. Diplomasi budaya dapat membantu mengurangi ketegangan, membangun saling pengertian, dan membuka jalan untuk negosiasi politik (Cull, 2008).

3. Interaksi Antarbudaya: Dalam hubungan internasional, interaksi antarbudaya sangat penting untuk menghindari konflik dan membangun kerjasama. Pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan budaya dapat membantu negara-negara berkomunikasi lebih efektif dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan(Huntington, 1993).

### **2.1.2 Diplomasi**

Diplomasi dalam hubungan internasional merupakan suatu mekanisme yang digunakan oleh negara-negara untuk mempengaruhi opini pemerintah dan publik negara lain dengan tujuan mencapai kepentingan nasional. Hal ini penting dalam memunculkan etika dan norma dalam hubungan internasional yang mengacu pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan perdamaian (Rohman & Mansyur, 2022). Aktivitas diplomasi, baik tradisional maupun digital, sering dikaitkan dengan tindakan para utusan negara dalam membangun hubungan internasional dengan negara lain(Pratiwi & Chotimah, 2021). Diplomasi juga dapat dilakukan oleh entitas lain seperti pemerintah daerah, yang memerlukan peran komunikasi untuk memberikan informasi dan pemahaman mengenai kebijakan negara dalam proses diplomasi publik(Hutasoit & Dermawan, 2019)

Istilah diplomasi sering digunakan dalam percakapan sehari-hari dan memiliki banyak arti. Seorang cendekiawan Inggris dan mantan Menteri Britania Raya untuk Jepang mendefinisikan diplomasi sebagai *“Diplomacy is the application of intelligence and tact to the conduct of official relations between governments of independent states”* Artinya, diplomasi adalah penggunaan kecerdasan dan kebijaksanaan dalam menjalankan hubungan resmi antara

pemerintah negara-negara merdeka Selain itu, Sir Ian Brownlie, seorang pengacara dan akademisi Inggris yang ahli dalam hukum internasional, mendefinisikan diplomasi sebagai segala cara yang digunakan untuk menjalin dan memelihara hubungan serta komunikasi antara negara, atau untuk melaksanakan transaksi politik dan hukum melalui perwakilan resmi yang memiliki otoritas (Setiawan & Sulastri, 2017).

Diplomasi merupakan suatu mekanisme penting dalam hubungan antar negara yang melibatkan berbagai jenis pendekatan dan strategi terdapat beberapa jenis diplomasi yang dapat dikenali dalam konteks hubungan internasional.

1. Diplomasi Publik (Public Diplomacy): Diplomasi publik merupakan upaya negara untuk mempengaruhi opini publik di luar negeri melalui berbagai cara, seperti media komunikasi, pertukaran budaya, dan program-program informasi. Diplomasi publik sering kali menggunakan media komunikasi bersama dengan alat-alat interpersonal dan lainnya untuk mencapai tujuan diplomasi (Entman, 2008). Diplomasi publik juga merupakan instrumen penting dalam mencapai soft power, yang memerlukan pemahaman tentang kredibilitas, kritik diri, dan peran masyarakat sipil dalam menghasilkan pengaruh positif (Nye, 2008).
2. Diplomasi Ilmiah (Science Diplomacy): Diplomasi ilmiah melibatkan berbagai kegiatan untuk mempromosikan dan mengamankan tujuan kebijakan luar negeri suatu negara melalui sains. Hal ini dapat mencakup penggunaan pengetahuan ilmiah dan keahlian untuk memfasilitasi kerja sama ilmiah internasional, membawa ilmuwan ke dalam negosiasi

diplomatik, atau mengangkat ataşe sains ke kedutaan besar (Krasnyak & Ruffini, 2020).

3. **Diplomasi Budaya (Cultural Diplomacy):** Diplomasi budaya melibatkan pertukaran budaya, seni, dan nilai-nilai antara negara-negara untuk memperkuat hubungan antarbangsa. Diplomasi budaya dapat mencakup representasi budaya melalui seni atau pendidikan, kerjasama budaya, dan promosi kekayaan budaya suatu negara di tingkat internasional(Welslau & Selck, 2024).
4. **Diplomasi Korporat (Corporate Diplomacy):** Diplomasi korporat merupakan upaya perusahaan untuk meningkatkan legitimasi dan pengaruh mereka di tingkat internasional. Perusahaan dapat terlibat dalam diplomasi publik untuk mencapai penerimaan kebijakan luar negeri negara asal mereka di luar negeri, di mana peran perusahaan biasanya lebih sekunder(Ordeix-Rigo & Duarte, 2009).
5. **Diplomasi Diaspora (Diaspora Diplomacy):** Diplomasi diaspora melibatkan upaya komunitas diaspora suatu negara untuk mempromosikan kepentingan negara asal mereka di negara tempat tinggal mereka. Diplomasi diaspora dapat mencakup upaya untuk memperkuat hubungan antara negara asal dan diaspora, serta mempengaruhi kebijakan luar negeri negara tempat tinggal mereka (Moise, 2023).

Hans J. Morgenthau, salah satu tokoh terkemuka dalam politik internasional pada abad ke-20, menyatakan bahwa "Diplomasi adalah promosi kepentingan nasional melalui cara yang damai." Menurut Morgenthau, diplomasi



memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, diplomasi mencakup "pembentukan dan pelaksanaan politik luar negeri pada semua tingkatan, dari yang tertinggi hingga yang terendah." Artinya, diplomasi melibatkan proses merumuskan dan menjalankan kebijakan luar negeri pada setiap level pemerintahan. Sedangkan dalam arti sempit, diplomasi adalah suatu media, saluran, atau cara di mana hubungan resmi antara pemerintah-gubernur terjadi (Setiawan & Sulastri, 2017).

Seiring perkembangan diplomasi, muncul rasa saling ketergantungan antara negara-negara. Dalam diplomasi, salah satu proses yang sering digunakan adalah negosiasi, selain bentuk-bentuk lain seperti pertemuan, kunjungan, dan perjanjian. Oleh karena itu, negosiasi adalah teknik dalam diplomasi untuk menyelesaikan perbedaan secara damai dan memajukan kepentingan nasional suatu negara. Dari sini, bisa disimpulkan bahwa diplomasi adalah kombinasi antara ilmu dan seni berunding untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasional. Ini mencakup bidang politik, ekonomi, perdagangan, sosial, budaya, pertahanan, militer, dan berbagai kepentingan lainnya dalam hubungan internasional. Untuk mencapai kepentingan diplomasi suatu negara, banyak cara yang bisa dilakukan (Watson, 2013).

Dalam bukunya "Kautilya's Concept of Diplomacy: a New Interpretation," Kautilya mengatakan bahwa tujuan utama diplomasi adalah melindungi kepentingan negara. Selain itu, diplomasi juga penting untuk ekonomi, perdagangan, melindungi warga negara di luar negeri, mengembangkan budaya dan ideologi, serta meningkatkan reputasi negara dengan berhubungan baik

dengan negara lain(Mukherje, 2008).Ada aturan khusus yang harus diikuti ketika suatu negara ingin menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Aturan ini ada dalam Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik, yang menjadi panduan dasar hukum diplomatik. Konvensi Wina ini adalah upaya pertama dalam mengembangkan hukum internasional, termasuk hukum diplomatik, yang dimulai pada tahun 1949 oleh komisi hukum internasional. Konvensi ini menjelaskan secara rinci aturan tentang hak istimewa dan interaksi diplomatik.

Konvensi Wina 1961 merupakan instrumen hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antara negara-negara. Konvensi ini mencakup berbagai aspek hukum diplomatik yang menjadi dasar bagi negara-negara untuk menjalin hubungan diplomatik yang didasarkan pada kesepakatan dan diatur dalam instrumen hukum sebagai kodifikasi kebiasaan dan kemajuan hukum internasional(Nurhakiki & Mohammad Husni Syam, 2024). Konvensi Wina 1961 juga mengatur mengenai kekebalan diplomatik yang diberikan kepada pejabat diplomatik, yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara penerima (Chairunnisa et al., 2022).

Dalam praktiknya, Konvensi Wina 1961 sering kali menjadi acuan dalam menangani kasus-kasus terkait pelanggaran keistimewaan dan kekebalan diplomatik oleh pejabat diplomatik. Terdapat kasus di mana pejabat diplomatik melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Konvensi Wina 1961, seperti penyalahgunaan hak keistimewaan dan kekebalan yang dimilikinya.Negara-negara juga memiliki kewajiban terkait dengan terjadinya pelanggaran

keistimewaan dan kekebalan diplomatik oleh pejabat diplomatik, yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 (Setyardi, 2018).

### **2.1.3 Diplomasi Budaya**

Diplomasi budaya merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan luar negeri suatu negara yang bertujuan untuk mempromosikan kebudayaan, membangun hubungan antarbangsa, dan meningkatkan pemahaman lintas budaya. Dalam konteks diplomasi budaya, terdapat beragam pendekatan dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah melalui kerjasama industri kreatif, seperti sub sektor mode, yang dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan kekayaan budaya suatu negara ke dunia internasional (Joisangadji & Rasyidah, 2021). Selain itu, diplomasi budaya juga dapat dilakukan melalui festival, pertunjukan seni, pertukaran budaya, dan berbagai kegiatan lain yang memperkuat hubungan antarbangsa melalui aspek budaya (Musa et al., 2022).

Konsep diplomasi budaya juga melibatkan upaya untuk mengelola lingkungan internasional dengan membuat sumber daya budaya suatu negara dikenal di luar negeri, serta memfasilitasi transmisi budaya ke negara lain (Akil & Kusumawardhana, 2021). Dalam hal ini, diplomasi budaya dapat didefinisikan sebagai cara untuk memperluas pengaruh suatu negara melalui kegiatan budaya yang positif dan membangun citra positif di mata dunia internasional. Diplomasi budaya juga dapat menjadi alat utama pemerintah dalam meningkatkan daya tarik negaranya terhadap negara lain (Rijal, 2017).

Salah satu aspek penting dalam diplomasi budaya adalah pemanfaatan soft power, yang merupakan kemampuan suatu negara untuk memengaruhi perilaku negara lain melalui daya tarik budaya, nilai-nilai, dan kebijakan yang dianggap positif. Soft power ini dapat digunakan sebagai strategi untuk memperkuat diplomasi budaya dan memperluas pengaruh suatu negara di kancah internasional (Nye, 2008b). Dalam konteks ini, diplomasi budaya juga dapat menjadi kunci utama dari soft power yang sering digunakan oleh pemerintah berbagai negara di dunia untuk mencapai kepentingan nasional mereka (Putri & Trisni, 2021a).

Selain itu, diplomasi budaya juga dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti program kebudayaan, festival, pertunjukan seni, dan kegiatan lain yang memperkenalkan kekayaan budaya suatu negara ke dunia internasional. Misalnya, implementasi diplomasi budaya Perancis di Indonesia melalui program kebudayaan Pekan Frankofoni tahun 2014 merupakan contoh bagaimana negara-negara menggunakan kekuatan kebudayaan mereka untuk memperkuat hubungan bilateral dan mempromosikan citra positif di mata dunia (Aldrin, 2022). Diplomasi budaya juga dapat dilakukan melalui kerjasama dengan aktor swasta, seperti dalam kasus peran SM Entertainment dalam diplomasi publik Korea Selatan (Putri & Trisni, 2021).

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, diplomasi budaya juga semakin terbuka untuk dimanfaatkan melalui media digital. Diplomasi digital menjadi salah satu strategi yang digunakan dalam memperluas jangkauan diplomasi budaya, terutama di era pandemi seperti Covid-19. Studi kasus Festival Cap Go Meh di Kota Singkawang merupakan contoh bagaimana model strategi

diplomasi budaya dapat beradaptasi dengan kondisi saat ini dan memanfaatkan media digital untuk tetap menjalankan kegiatan diplomasi budaya (Nugrahaningsih & Suwarso, 2021).

Selain itu, diplomasi budaya juga dapat dilakukan melalui pemasaran kuliner, yang dikenal sebagai gastrodiplomasi. Negara-negara menggunakan makanan sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan budaya mereka, membangun citra positif, menarik wisatawan asing, dan memperkuat hubungan dengan publik asing. Pemasaran kuliner Indonesia berbasis digital di Sasanuphatum Thailand merupakan contoh bagaimana gastrodiplomasi dapat menjadi sarana efektif dalam memperkenalkan kekayaan kuliner dan budaya suatu negara ke dunia internasional (Luckyardi & Apriliani, 2022).

Demikian, diplomasi budaya merupakan instrumen yang penting dalam kebijakan luar negeri suatu negara untuk memperkuat hubungan antarbangsa, mempromosikan kebudayaan, dan membangun citra positif di mata dunia internasional. Melalui berbagai pendekatan, strategi, dan media, diplomasi budaya dapat menjadi sarana efektif dalam memperluas pengaruh suatu negara, memperkuat soft power, dan mempererat hubungan antarbangsa melalui aspek budaya.

#### **2.1.4 Nation Branding**

Konsep Nation Branding sudah ada sejak lama dan bukan merupakan hal baru. Simon Anholt memperkenalkan konsep ini pada tahun 1996 untuk membantu negara-negara membentuk strategi, kebijakan, inovasi, dan investasi dalam hubungan internasional. Menurut Simon Anholt dalam bukunya yang

berjudul "Nation Branding: A Continuing Theme," Nation Branding adalah cara untuk mengumpulkan pandangan positif dari komunitas internasional dan membentuk strategi negara untuk menciptakan citra positif demi keuntungan dan kepentingan nasionalnya(Simon, 2007)

Nation Branding adalah hasil dari persepsi masyarakat internasional dan strategi yang dibuat oleh sebuah negara untuk membentuk citra positif, dengan tujuan meraih keuntungan dan memenuhi kepentingan nasionalnya (Anholt, 2007)Menurut Keith Dinnie, Nation Branding adalah strategi manajemen merek yang bertujuan meningkatkan reputasi negara dengan menggabungkan berbagai elemen dan aspek budaya negara tersebut sehingga dapat diterima oleh negara lain (Dinnie, 2010).

Nation Branding adalah salah satu cara menyebarkan pengaruh soft power. Menurut Nye, soft power melibatkan unsur-unsur seperti budaya, nilai-nilai, dan kebijakan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara adalah mempromosikan kebudayaan ke negara lain. Nation branding digunakan untuk menyatukan elemen-elemen seperti pemerintah, masyarakat, sejarah, dan kebudayaan ke dalam suatu logo atau simbol yang mewakili identitas negara tersebut. Dengan adanya logo yang mencerminkan identitas nasional, diharapkan hal ini dapat menarik perhatian, baik dari negara lain maupun masyarakat internasional.

Dalam konteks negara, nation branding dipandang sebagai alat yang dapat memberikan perubahan positif, serta meningkatkan dan memperbaiki citra bangsa di mata dunia.Nye menjelaskan bahwa sebuah negara dapat mencapai apa yang diinginkannya di arena politik global melalui kekaguman terhadap nilai-nilai atau

aspirasinya, yang meningkatkan peluang kerja sama dan keterbukaan ekonomi (Travis & Watkins, 1959). Hal ini membuat negara lain tertarik untuk mengikuti langkahnya. Ini berbeda dengan konsep hard power yang menggunakan cara-cara koersif atau pemaksaan. Sesuai dengan konsep diplomasi modern dari R.P. Barston, pelaksanaan soft power diplomacy melibatkan bukan hanya pemerintah, tetapi juga media massa, artis dan idola, perusahaan musik, bahkan masyarakat.(Barston, 2006).

Konsep nation branding dalam penelitian ini mengarah kepada kebudayaan Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk memperkenalkan Indonesia ke seluruh dunia khususnya di Thailand melalui Indonesian Cultural Night.

## **2.2 Kerangka pemikiran**

Hubungan antara Indonesia dan Thailand telah berlangsung sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, dengan keterikatan yang tercipta melalui seni budaya, agama, arsitektur, dan karya sastra. Hubungan formal kedua negara dimulai pada 7 Maret 1950, mencakup berbagai bidang seperti budaya, ekonomi, perdagangan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks ini, diplomasi, terutama diplomasi budaya, memainkan peran kunci dalam memperkuat hubungan bilateral.

Teori hubungan internasional membantu menjelaskan dinamika dan kompleksitas interaksi antara negara-negara. Dalam konteks hubungan Indonesia dan Thailand, pendekatan ini menekankan pentingnya kerjasama dan interaksi

budaya sebagai fondasi untuk membangun kepercayaan dan saling pengertian. Hubungan diplomatik yang kuat seringkali didukung oleh hubungan budaya yang erat, yang dapat meningkatkan kerja sama di berbagai bidang lain seperti ekonomi dan teknologi.

Diplomasi sebagai praktik dalam hubungan internasional melibatkan negosiasi, dialog, dan upaya-upaya damai untuk mempengaruhi keputusan pemerintahan asing. Diplomasi budaya, sebagai bagian dari diplomasi publik, bertujuan memperkenalkan dan mempromosikan budaya suatu negara untuk membangun pemahaman dan kepercayaan lintas budaya. Indonesian Cultural Night 2023 adalah contoh konkret dari diplomasi budaya yang berupaya memperkuat hubungan antara Indonesia dan Thailand melalui promosi budaya.

Indonesian Cultural Night 2023 menjadi platform untuk menampilkan kekayaan budaya Indonesia melalui pameran seni, pertunjukan musik dan tari tradisional, festival kuliner, serta workshop kerajinan tangan. Acara ini menggunakan pendekatan soft power, konsep yang diperkenalkan oleh Joseph Nye, yang menekankan pentingnya daya tarik budaya sebagai alat pengaruh dalam hubungan internasional. Dengan menonjolkan daya tarik budayanya, Indonesia berupaya mempengaruhi persepsi masyarakat Thailand, meningkatkan simpati dan pemahaman terhadap budaya Indonesia.

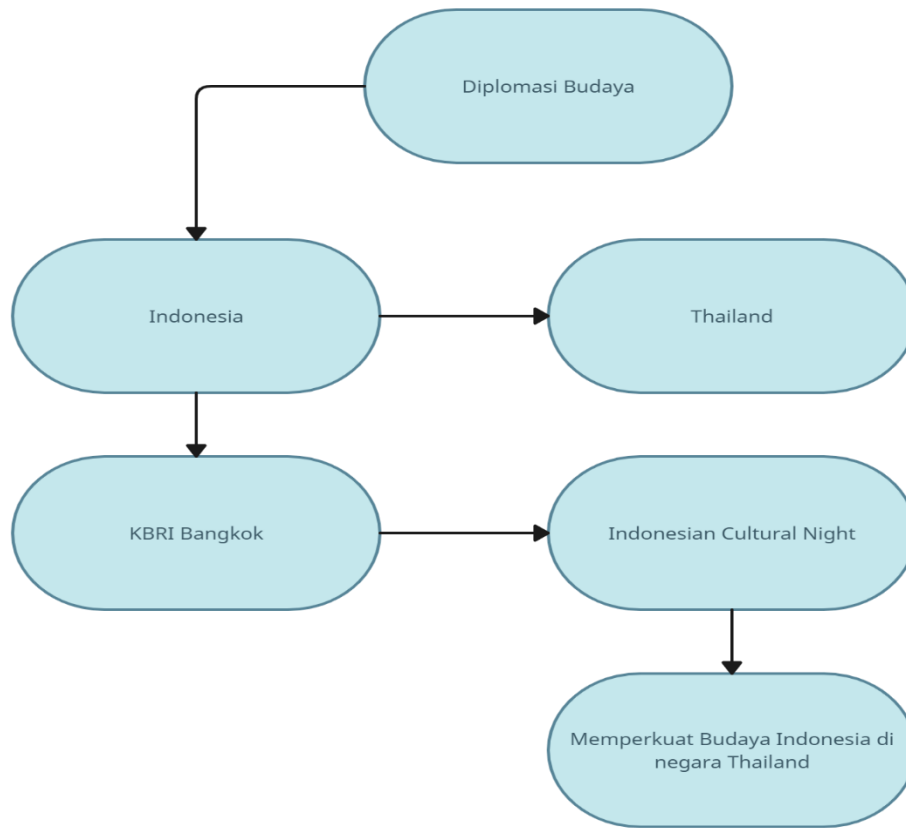
Diplomasi budaya dalam konteks ini juga dapat dijelaskan melalui teori komunikasi antarbudaya. Teori ini membantu memahami proses interaksi dan pemahaman antara individu dari budaya yang berbeda. Melalui Indonesian Cultural Night 2023, masyarakat Thailand mendapatkan kesempatan untuk



berinteraksi langsung dengan budaya Indonesia, mengurangi stereotip, dan meningkatkan pemahaman lintas budaya. Interaksi ini diharapkan dapat memperkuat hubungan kedua negara dengan membangun fondasi yang lebih solid berdasarkan saling pengertian dan apresiasi budaya.

Selain itu, teori identitas nasional juga relevan dalam kerangka pemikiran ini. Indonesian Cultural Night 2023 tidak hanya bertujuan untuk mempromosikan kekayaan budaya Indonesia di luar negeri tetapi juga untuk memperkuat identitas nasional di kalangan masyarakat Indonesia sendiri. Dalam era globalisasi, promosi budaya menjadi penting untuk menjaga dan memperkuat identitas nasional. Melalui acara ini, Indonesia menunjukkan pentingnya menjaga warisan budaya sebagai bagian integral dari identitas nasional, yang pada gilirannya meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia.

Dengan mengintegrasikan teori-teori hubungan internasional, diplomasi, dan diplomasi budaya, kerangka pemikiran ini memberikan dasar yang komprehensif untuk meneliti peran Indonesian Cultural Night 2023 dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand. Diplomasi budaya melalui acara ini diharapkan dapat memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia, membangun citra positif, dan memperkuat hubungan serta kerja sama antara kedua negara.



**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**

Sumber: Peneliti